

**KOLONISASI FIFA TERHADAP DUNIA:
ANALISIS DENGAN PENDEKATAN KRITIS DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI**

Narayana Mahendra Prastya

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya,
Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta
Email: narayana@uii.ac.id

Abstract

FIFA is an organization that has power beyond the country's sovereignty. FIFA will impose sanctions for member states, when the country's government to intervene against football. Instead, FIFA can also press the government of a country to ensure it does not intervene.

The majority of the discussion regarding the powers of FIFA more dominant from the perspective of law. This paper offers a conceptual discussion from the viewpoint of science communication. The selected viewpoint is critical approach to organizational communication. Using the concept of Stan Deetz, concluded that what FIFA is a form of colonization of an organization against the parties that are outside the organization. This makes communication patterns FIFA only runs in top down models.

Keywords: *critical perspectives, FIFA, organizational communication, sport communication*

Abstrak

FIFA merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan melebihi kedaulatan negara. FIFA bakal menjatuhkan sanksi bagi negara anggotanya, ketika pemerintah negara tersebut melakukan intervensi terhadap sepakbola. Sebaliknya, FIFA juga bisa menekan pemerintah sebuah negara untuk memastikan agar tidak melakukan intervensi.

Mayoritas pembahasan mengenai kekuasaan FIFA lebih dominan dari perspektif ilmu hukum. Tulisan ini menawarkan pembahasan konseptual dari sudut pandang ilmu komunikasi. Sudut pandang yang dipilih adalah pendekatan kritis dalam komunikasi organisasi. Menggunakan konsep dari Stan Deetz, disimpulkan bahwa apa yang dilakukan FIFA merupakan bentuk kolonisasi sebuah organisasi terhadap pihak-pihak yang ada di luar organisasi tersebut. Ini membuat pola komunikasi FIFA hanya berjalan satu arah saja, atau bersifat top down.

Kata kunci: *FIFA, komunikasi organisasi, perspektif kritis, komunikasi olahraga*

PENDAHULUAN

Apakah negara bernama Wales, Irlandia Utara, Skotlandia, Kepulauan Faeroe atau Taiwan (China Taipei) terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Jawabannya adalah tidak. Jika mengacu pada informasi yang ada di situs resmi PBB (<http://www.un.org/en/members/>,

diakses 1 Februari 2012) Wales, Irlandia Utara dan Skotlandia merupakan wilayah dari Britania Raya, Kepulauan Faeroe adalah bagian dari Denmark, dan Taiwan merupakan kawasan milik Republik Rakyat Tiongkok.

“Pengakuan” terhadap eksistensi keempat negara tadi diberikan oleh Federasi Asosiasi Sepakbola Seluruh Dunia (FIFA). Ada sekitar 200 negara yang menjadi anggota FIFA, di mana angka tersebut melebihi negara yang terdaftar sebagai anggota PBB (Watts, 2010).

Jika mengacu pada FIFA, maka negara bisa terpecah-pecah. Britania Raya misalnya, menjadi empat: Inggris (*England*), Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Masing-masing negara memiliki asosiasi sepakbola sendiri, tim nasional sepakbola sendiri, bendera, dan lagu kebangsaan sendiri. Kondisi ini tidak ditemui di cabang olahraga mana pun. Di olimpiade, tenis, bulutangkis, dan olahraga otomotif misalnya, tidak ada yang namanya atlet dari Inggris, Wales, Skotlandia, atau Irlandia Utara. Yang ada adalah atlet dari Britania Raya (*United Kingdom – UK* atau *Great Britain - GB*).

Dalam kasus Britania Raya, “Jalan Pemikiran” FIFA ini boleh jadi memicu terjadinya “nasionalisme sempit” di empat negara tadi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya resistensi dari empat “negara” tadi terhadap rencana pengiriman tim sepakbola Britania Raya di Olimpiade 2012 yang berlangsung di London, ibukota Britania Raya. Adapun terakhir kali tim sepakbola Britania Raya ambil bagian di Olimpiade adalah tahun 1960 di Roma, Italia (“Tim Sepakbola Inggris Raya untuk Olimpiade Menuai Kecaman”, BBC.co.uk).

Rupa-rupanya, Olimpiade 2012 menjadi kali terakhir (setidaknya hingga saat ini), tim sepakbola Britania Raya mentas di ajang Internasional. Di Olimpiade 2016, tim Britania Raya tidak ambil bagian karena gagal terbentuk. Mulanya, asosiasi sepakbola Inggris (FA) berkirim surat kepada asosiasi sepakbola Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara untuk mengajak bergabung sebagai tim Britania Raya guna tampil di Olimpiade 2016. Namun tawaran tersebut tidak mendapatkan respon positif sehingga tim Britania Raya tak ambil bagian di Rio de Janeiro 2016. Alasannya adalah Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara

beranggapan tim Britania Raya akan mengancam status mereka yang independen di hadapan FIFA (“Tim Sepakbola Britania Raya Gagal Terbentuk”, cnnindonesia.com).

Kasus Britania Raya merupakan salah satu contoh betapa besarnya kekuasaan FIFA. Masih ada sejumlah contoh lain besarnya kekuasaan organisasi yang bermarkas di Zurich, Swiss tersebut. Misalkan perpindahan Australia dari kawasan “asli”-nya yakni Oseania kemudian berpindah menjadi bagian dari benua Asia, Israel (yang sejatinya Asia) sebagai bagian dari benua Eropa. Dengan kata lain, FIFA telah membuat peta dunia menjadi berhologram, antara politik-ekonomi dan olahraga (Natakusumah, 2005). Salah satu “pengakuan” akan besarnya kekuasaan FIFA, majalah *Forbes* (November 2011) menempatkan presiden FIFA (saat ini) Joseph S. Blatter dalam jajaran 70 orang terkuat di dunia (“Forbes name Blatter among World’s Most Powerful People”, www.fifa.com).

Besarnya kekuasaan FIFA berhasil menembus batas-batas kedaulatan sebuah negara. FIFA melarang keras intervensi pihak ketiga, termasuk negara,

dalam pengelolaan sepakbola oleh federasi atau asosiasi sepakbola sebuah negara. Sebaliknya, FIFA dapat menekan pemerintah sebuah negara agar memberikan otonomi penuh kepada federasi atau asosiasi sepakbola yang bersangkutan. Intervensi pihak ketiga terhadap federasi atau asosiasi sepakbola sebuah negara, meski itu demi kebaikan sepakbola nasional, merupakan hal yang haram di mata FIFA. Sebagai contoh adalah pemerintah dan parlemen Yunani menyerah terhadap kemauan FIFA yang mendesak Yunani agar Undang-undang olahraga yang akan disahkan dikecualikan pemberlakuannya terhadap Federasi Sepakbola Yunani (HFF) sebagai anggota FIFA dan UEFA (Pandjaitan, 2011: 307).

Kekuasaan organisasi yang berdiri tahun 1904 tersebut merupakan bentuk kolonisasi sebuah korporasi terhadap kehidupan sehari-hari. Kolonisasi berarti nilai-nilai dari sebuah organisasi yang menjalar ke luar sehingga mempengaruhi pola pikir pihak lain di luar organisasi. Bagi negara anggota FIFA, jatuhnya sanksi FIFA merupakan “kiamat kecil” karena negara tersebut akan dilarang ikut serta di pertandingan resmi FIFA, tidak

memperoleh bantuan dana dari FIFA, dan anggota federasi dilarang mengikuti agenda resmi FIFA.

Diskusi publik mengenai kekuatan organisasi FIFA kebanyakan membahas dari sudut pandang hukum. Dari kacamata hukum, besarnya kekuasaan FIFA memiliki dasar teoritik yang kuat. Namun, dari sudut pandang ilmu komunikasi, "kedaulatan" FIFA dapat dikritisi. Tulisan ini membahas mengenai kekuatan FIFA menggunakan pendekatan kritis dalam komunikasi organisasi. Pendekatan tersebut dirumuskan oleh Stanley Deetz.

Sebagai bahan pembahasan, tulisan ini menggunakan contoh kasus yakni bagaimana intervensi FIFA terhadap persepakbolaan Indonesia di tahun 2011, ketika PSSI dipimpin oleh Nurdin Halid. Minimnya prestasi tim nasional Indonesia, status Nurdin Halid yang pernah menjadi tersangka kasus kriminal, membuat desakan untuk mundur semakin kuat. Pada akhirnya pemerintah pun turun tangan demi sepakbola Indonesia. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bayang-bayang sanksi FIFA.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk

membahas cara komunikasi yang dilakukan oleh FIFA terhadap para anggotanya. Acuan teoritik yang digunakan adalah teori kritis komunikasi organisasi dari Stanley Deetz.

METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen berupa berita dari media, informasi-informasi yang terdapat pada situs resmi FIFA (www.fifa.com), dan kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan kewenangan FIFA.

Studi dokumen dalam penelitian ini mengadopsi teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data nonlapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya sebagai obek primer sekaligus sekunder (Ratna, 2010:197). Studi pustaka berguna untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam pembahasan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi, mengetahui perkembangan ilmu berkaitan dengan penelitian. Sumber bacaan studi pustaka dapat berupa buku,

jurnal, terbitan periodik, *review* tahunan, dan lain-lain (Nazir, 2003: 93-105).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kritis dalam Komunikasi di Organisasi

Tulisan ini menggunakan teori dari Stanley Deetz mengenai teori kritis dalam komunikasi di organisasi. Deetz memulai pemikiran tersebut dengan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menjadi institusi ekonomi tetapi juga politik. Ia menggunakan kemajuan dalam teori komunikasi untuk menemukan bagaimana praktik komunikasi dalam perusahaan dapat mempengaruhi pembuatan keputusan (*decision making*). Kemudian ia merangkum cara bagaimana perusahaan dapat menjadi lebih produktif dan demokratis melalui perbaikan komunikasi (Griffin, 2006).

Deetz memandang perusahaan-perusahaan multinasional sebagai kekuatan dominan dalam masyarakat yang lebih kuat daripada negara, atau keluarga dalam mempengaruhi kehidupan individu. Ruang eksekutif perusahaan menjadi tempat di mana hampir semua keputusan berkaitan dengan penggunaan

sumber daya alam, pembangunan teknologi baru, ketersediaan produk, dan hubungan kerja dibuat. Menurut Deetz, perusahaan-perusahaan raksasa ini mengendalikan dan mengkolonisasi kehidupan modern dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah atau badan umum setelah era feodal berakhir. Namun kesalahan yang dibuat oleh kontrol perusahaan itu adalah terjadi penurunan kualitas hidup manusia pada sebagian besar warga (Griffin, 2006).

Menurutnya, wacana normal yang terjadi dalam sebuah organisasi melibatkan empat dimensi dominasi yakni: naturalisasi, netralisasi, legitimasi, dan sosialisasi (Littlejohn dan Foss, 2005: 263). Berikut adalah penjelasan singkat dari keempat dimensi tadi.

- *Naturalisasi*: para aktor yang ada di organisasi tersebut mengasumsikan bahwa mereka yakin tentang organisasi, tujuan organisasi, dan struktur organisasi adalah alami, normal, dan diterima oleh semua.
- *Netralisasi*: informasi dipandang netral dan bebas nilai.
- *Legitimasi*: usaha organisasi untuk mendahulukan satu bentuk wacana

sebagai suara otoritas di dalam organisasi. Perspektif manajemen dipandang memiliki otoritas daripada perspektif pihak lain.

- *Sosialisasi*: proses “pelatihan” kepada anak buah yang terus berkelanjutan agar karyawan menerima dan mengikuti tuntutan moral dari perusahaan.

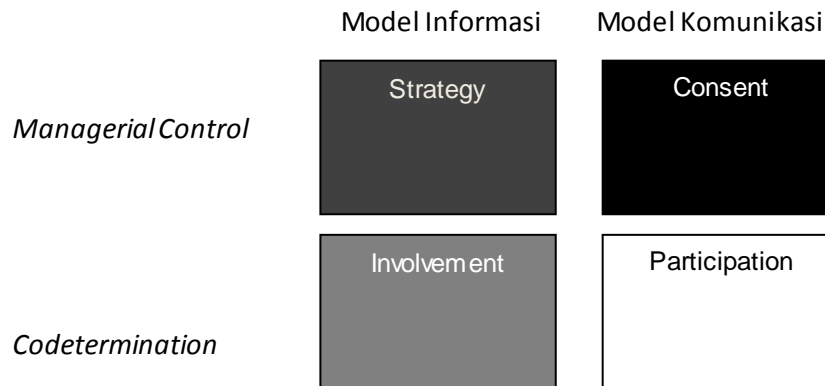
Keempat dimensi tersebut menimbulkan distorsi komunikasi secara sistematis, yang melayani kepentingan-kepentingan dari kapitalisme manajerial, dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan manajerial itu sendiri. Informasi-informasi yang sudah terdistorsi tadi dimasukkan ke dalam organisasi melalui bentuk, aturan, kode, dan kebijakan sebagai lapisan penutup yang memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dan menghambat terjadinya demokrasi.

Deetz memulai analisisnya dengan memandang bahwa informasi yang disampaikan dalam organisasi murni merupakan informasi atau komunikasi di mana di dalamnya sudah terjadi penciptaan makna. Dalam konsep ini, ada dua poin dari pemikiran Deetz yakni model informasi dan model komunikasi. Model

Informasi memandang komunikasi semata-mata merupakan saluran untuk menyampaikan informasi tentang kenyataan. Sementara model komunikasi memandang bahwa bahasa merupakan medium utama di mana realitas sosial dibentuk dan dipertahankan (Griffin, 2006: 302-304).

Setelah membahas dengan cara apa pesan disampaikan, Deetz melanjutkan analisisnya dengan memandang seperti apa keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Deetz membagi masalah keterlibatan ini menjadi *managerial control* dan *codetermination*. *Managerial control* sebagai proses pengambilan keputusan di mana orang-orang yang terkena efek dari keputusan tersebut tidak dilibatkan. Sementara dalam *codetermination*, proses pengambilan keputusan diambil lewat dialog secara terbuka di antara para pemangku kepentingan. *Codetermination* mencerminkan bagaimana “konstruksi dari diri, pihak lain, dan dunia secara kolaboratif dan kolektif”, di mana Deetz meyakini bahwa *codetermination*

merupakan produk dari demokrasi partisipatoris. (Lihat Gambar 1)



Gambar 1. Model Informasi dan Model Komunikasi Deetz

Kekuasaan FIFA: Melampaui Kedaulatan Negara

Pembahasan berkaitan dengan FIFA, PSSI, dan Indonesia dimulai dengan pernyataan awal: bagaimana ketika sebuah negara (*state*) berhadapan dengan entitas badan hukum privat internasional yang memainkan peran sangat besar dan kuat, di mana *state* itu sama sekali menjadi tidak berdaulat dan tidak berwenang atas apa yang dilakukan oleh entitas badan hukum privat internasional tersebut (Pandjaitan, 2011: 32-68).

Guna memahami perdebatan ini, kita perlu membahas Teori Kedaulatan

Absolut dan Teori Kedaulatan Pluralis. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa PSSI harus tunduk kepada pemerintah Indonesia menggunakan perspektif Teori Kedaulatan Absolut, di mana hukum adalah seluruh aturan yang dikenakan kepada manusia di suatu wilayah yang ditetapkan oleh suatu otoritas yang dapat menghukum dengan kekuatan dominasi yang efektif dan memaksa. Otoritas penguasa tersebut hanya ada dalam negara, yakni kekuasaan untuk menghukum dan memaksa sesuai dengan kekuasaan negara. Namun teori tersebut hanya tepat ketika hubungan internasional antar *state* belum sekuat

dan serumit ini, yang ditandai dengan dunia tanpa batas (*borderless state*) (Pandjaitan, 2011: 32-68).

Itu sebabnya Teori Kedaulatan Pluralis lebih tepat digunakan dalam konteks PSSI. Aliran kedaulatan pluralis pada hakikatnya melahirkan demokrasi yang pada dasarnya memiliki tiga pendekatan berbeda tetapi memiliki peran yang sama-sama penting dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Tiga pendekatan tersebut adalah *market*, *state*, dan *society*. Ketiga wilayah itu memiliki logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan. Tidak boleh ada yang lebih dominan terhadap yang lainnya sepanjang menyangkut kewenangan dan otonomi masing-masing (Pandjaitan, 2011: 32-68).

Dalam konteks tersebut maka PSSI, AFC (Federasi Sepakbola Asia) dan FIFA dapat disebut sebagai *civil society* dan *market* sekaligus dan pemerintah Indonesia sebagai *state*. Itu sebabnya pemerintahan sebuah negara perlu mengakui keberadaan *society* secara tulus

dan ikhlas. Negara perlu memberikan kesempatan kepada otoritas FIFA, AFC, dan PSSI sebagai *civil society* yang mendunia dan yang dapat membentuk market sendiri. Hal itu dapat dicapai dengan cara memajukan kesejahteraan umum melalui pengelolaan dan penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional serta penyelesaian sengketa sepakbola profesional yang ditimbulkan, dibandingkan dengan peran negara di sisi yang lain. Negara dibentuk tidak dengan maksud untuk mengambil alih fungsi-fungsi yang secara alamiah dapat dikerjakan sendiri lebih efektif dan efisien oleh institusi masyarakat (Pandjaitan, 2011: 32-68).

Besarnya kekuasaan FIFA ini, tidak hanya membuat peta dunia menjadi "kacau" (Natakusumah, 2005), kekuasaan FIFA juga bahkan mampu melewati kedaulatan negara. Contohnya adalah dalam kasus asosiasi sepakbola Bosnia (NFSBiH) yang dikenai sanksi FIFA per 1 April 2011 karena memiliki tiga presiden yang masing-masing mewakili golongan Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Pembagian kekuasaan kepada tiga golongan tersebut merupakan sistem politik di Bosnia yang

diterapkan sebagai bagian dari perjanjian Dayton tahun 1995. Setiap kelompok dari tiga golongan besar itu bahkan memiliki tingkat otonomi yang tinggi untuk tetap mempertahankan tiga angkatan bersenjata dari kelompok etnis yang berbeda untuk mempertahankan teritori masing-masing satu dengan lainnya. Yang unik, tiga angkatan bersenjata ini tidak memiliki kewajiban mempertahankan negara dari musuh yang datang dari luar (Dziewulska, 2002).

FIFA dan UEFA (asosiasi sepakbola kawasan Eropa) sebenarnya sempat “merestui” kebijakan tiga pimpinan untuk Federasi Sepakbola Bosnia. Tujuannya agar pengelolaan sepakbola di Bosnia yang dirundung konflik berkepanjangan bisa segera berjalan kembali. Tiga orang tersebut mewakili etnis yang berbeda-beda secara *de facto* menjabat sebagai presiden federasi. Namun, secara administratif ada satu orang yang menjabat sebagai pimpinan resmi. Sementara yang lain berstatus “sub-federasi”. UEFA menyebut kompromi semacam itu adalah “solusi *ad-interim*” atau jalan keluar sementara, karena Bosnia memberikan jaminan bahwa

federasi mereka akan segera dikelola di bawah satu pimpinan, seperti layaknya federasi sepakbola di negara lain (Cooley dan Mujanovic, 2015: 53-54, 57).

Dalam perkembangan selanjutnya, FIFA memandang Bosnia gagal menepati komitmennya. Aturan baru gagal disusun. Alhasil, FIFA menjatuhkan sanksi, karena dalam statuta FIFA disebutkan bahwa presiden asosiasi sepakbola hanya bisa dijabat satu orang. FIFA mencabut sanksi tersebut pada 30 Mei, usai NFSBiH menuruti aturan dari FIFA. NFSBiH juga melakukan perubahan terhadap statuta-nya. Bosnia bukan hanya satu-satunya negara yang dikenai sanksi oleh FIFA karena tidak mengikuti Statuta FIFA. Irak, Brunei Darussalam, dan Nigeria adalah contoh negara yang juga pernah dikenai sanksi pembekuan keanggotaan oleh FIFA.

Sementara itu, Indonesia juga pernah berada di ambang ancaman sanksi FIFA. Peristiwa itu terjadi tahun 2011, di akhir masa jabatan kepengurusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) era kepemimpinan Nurdin Halid. Ketika itu masyarakat sudah muak dengan PSSI di bawah Nurdin yang berkuasa sejak tahun 2003. Dugaan pengaturan skor dan

suap dalam kompetisi sepakbola di Indonesia, tim nasional Indonesia yang tak kunjung berprestasi hingga politisasi timnas di kejuaraan Piala AFF 2010 merupakan dosa-dosa Nurdin. Intinya PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin gagal mempersembahkan yang terbaik bagi persepakbolaan Indonesia. Alhasil banyak yang meminta Nurdin untuk turun dari jabatannya. Kebencian terhadap Nurdin semakin menjadi karena pria berjudul "Sang Puang" ini sebenarnya telah melanggar Statuta FIFA pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan bahwa ketua umum asosiasi sepakbola di sebuah negara tidak boleh tersangkut kasus kriminal. Nurdin sendiri pernah ditahan karena kasus korupsi minyak goreng ("Menunggu FIFA menolak Nurdin lagi", detik.com). Adapun setiap negara anggota FIFA harus meratifikasi Statuta FIFA dalam statuta asosiasi atau federasi negara tersebut.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengambil tindakan sehubungan dengan upaya perbaikan sepakbola nasional, salah satunya lewat Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di Malang, pengujung Maret 2010. KSN tidak digagas

oleh PSSI, namun merupakan ide dari pemerintah.

Kongres ini melahirkan sejumlah rekomendasi untuk PSSI. Namun secara keseluruhan, banyak yang kecewa karena rekomendasi dari gelaran berbiaya sekitar Rp 3 miliar ini hanya ada di atas kertas. Rekomendasi menjadi tak berarti (tidak diindahkan PSSI) karena pemerintah – yang merupakan penyandang dana dan fasilitator KSN, takut sepakbola Indonesia terkena sanksi FIFA jika terlalu jauh mengintervensi PSSI (Marsis, 2011: 68).

Ancaman sanksi FIFA, membuat pemerintah sulit untuk bertindak dalam kasus PSSI ini. Pasalnya dalam statuta FIFA disebutkan bahwa intervensi dari pemerintah bisa menimbulkan ancaman sanksi. Nigeria dan Irak adalah contoh negara yang pernah di-*banned* oleh FIFA akibat intervensi yang dilakukan pemerintah. Statuta FIFA ini membuat Indonesia seakan kehilangan "kedaulatannya", karena secara struktural di tingkat Indonesia, PSSI berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia (KONI/KOI) (Marsis, 2011: 68). Alhasil, statuta FIFA soal larangan intervensi

pemerintah ini menimbulkan kerancuan: apakah federasi di sebuah negara adalah milik negara yang bersangkutan (yang harus menuruti peraturan di negara tersebut), atau “duta besar” dari FIFA (yang menjadikan statuta FIFA sebagai aturan baku) yang harus menempati prioritas utama?

Kongres PSSI untuk memilih kepengurusan baru periode 2011-2015 merupakan contoh betapa berkuasanya FIFA dan hilangnya kedaulatan Indonesia. Pemerintah memang telah mengeluarkan pernyataan (“Pemerintah Tak Akui Lagi PSSI di Bawah NH dan NB”, detik.com) tidak mengakui PSSI kepengurusan Nurdin pada 28 Maret 2011. Namun Nurdin dan anak buahnya baru benar-benar hengkang dari kantor PSSI ketika FIFA mengeluarkan keputusan tidak mengakui kepengurusan Nurdin dan membentuk Komite Normalisasi (KN) pada 4 April 2011 (Keterangan resmi mengenai pembentukan Komite Normalisasi terarsip dalam <http://www.fifa.com/associations/association=idn/news/newsid=1411950.html>).

KN bertugas menjadi PSSI *ad interim* dan nantinya menggelar kongres

pemilihan kepengurusan baru. Personel KN terdiri dari mantan pengurus PSSI serta perwakilan dari sejumlah klub sepakbola di Indonesia. Nama-nama para personel hingga jabatan yang mereka emban semuanya dipilih langsung oleh FIFA. KN diketuai oleh Agum Gumelar (Ketua umum PSSI periode 1999-2003).

KN memang berhasil menggelar kongres yang sukses memilih ketua, wakil ketua, dan anggota komite eksekutif PSSI untuk periode 2011-2015. Namun jalan yang ditempuh Agum cs sangat berat. Komite Normalisasi sampai harus dua kali menggelar kongres – di Jakarta pada Mei 2011 dan di Solo pada Juli 2011 guna mendapatkan kepengurusan periode 2011-2015.

Kegagalan kongres dipicu karena adanya *deadlock* menyusul protes yang dilancarkan oleh pendukung George Toisutta dan Arifin Panigoro. Dua nama tersebut, Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie, oleh FIFA dinyatakan tidak layak mencalonkan diri untuk posisi ketua, wakil ketua, atau anggota komite eksekutif PSSI. Penolakan ini menimbulkan kemarahan dari kubu pendukung Toisutta-Arifin yang membuat kongres pemilihan pengurus

mengalami *deadlock*. KN memang berusaha melobi FIFA soal Toisutta dan Panigoro, namun hasilnya nihil. Bisa dibayangkan betapa besar biaya yang harus dikeluarkan demi terbentuknya kepengurusan baru.

Keputusan FIFA membentuk KN memperoleh kritik, karena kewenangan KN hanya bisa menerima dan menjalankan titah dan perintah dari FIFA. Padahal FIFA hanyalah sebuah mesin yang tentu saja tidak tahu persis kondisi dan karakter sepakbola Indonesia (Marsis, 2011: 73).

Wajah dan kekuasaan anggota FIFA harus tunduk kepada badan dunia yang bermarkas di Swiss tersebut. Ketika ada salah satu negara anggotanya menghadapi permasalahan. Presiden FIFA Sepp Blatter akan memberikan penjelasan apa yang harus atau tidak harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan “melihat dan mengacu kepada semua ketentuan dalam Statuta FIFA” (Marsis, 2011: 44). Itu berarti satu-satunya jalan untuk tak terkena sanksi adalah menuruti Statuta FIFA, tidak peduli apakah yang diperintahkan dalam Statuta FIFA ternyata

tidak sesuai dengan sistem politik di negara yang bersangkutan.

Tidak hanya Bosnia yang pernah mendapatkan sanksi FIFA akibat intervensi pemerintah. Dalam kurun waktu 2009-2010, tercatat 25 negara dijatuhi sanksi FIFA akibat campur tangan negara, termasuk di antaranya adalah negara-negara yang merupakan kekuatan sepakbola seperti Inggris dan Prancis (Pandjaitan, 2011: 308-342).

Membahas FIFA dari Sudut Pandang Komunikasi Organisasi

Dari sudut pandang legal formal, maka tindakan FIFA dalam “mengintervensi” kedaulatan sebuah negara adalah sah. Namun begitu, apakah semua tindakan FIFA dapat dibenarkan? Dari disiplin ilmu komunikasi, terdapat sebuah sudut pandang guna mengkritisi FIFA.

Contoh kasus di Bosnia dan Indonesia tadi bisa dibahas dalam *core* Komunikasi Organisasi. Pola komunikasi FIFA yang bersifat *top down* dan keputusannya merupakan harga mati. Pola seperti ini merupakan pendekatan klasik di mana jajaran manajemen

(pemegang kekuasaan dalam hal ini adalah FIFA) menganggap bahwa komunikasi didesain untuk membantu para manajer mengontrol anak buahnya. Anak buah harus mendapatkan arahan langsung dari manajer karena anak buah dipandang tak memiliki kapabilitas untuk mengambil keputusan dengan bijak. Komunikasi benar-benar bersifat dari atasan kepada bawahan. Manajemen tidak tertarik dengan ide-ide dari anak buah (Heath, 2000: 302).

Pandangan ini ditentang oleh pandangan kritis, yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak istimewa dari manajemen dalam pengambilan keputusan. Menurut pandangan kritis, studi tentang organisasi khususnya komunikasi organisasi harus memberikan kebebasan kepada anak buah dengan membongkar kekuatan struktur yang menekan kebebasan dan preferensi individu (Heath, 2000: 321).

Kenyataannya menurut pandangan kritis, kekuatan-kekuatan itu diciptakan oleh manajemen untuk mengontrol pekerjaan, bahkan kehidupan anak buah. Manajer bisa mempengaruhi bahkan mendominasi performa anak buahnya

dengan menentukan bagaimana komunikasi ditampilkan dan apa yang dikomunikasikan. Inti dari komunikasi adalah tema, premis, metafora, dan naratif, termasuk juga simbol-simbol nonverbal yang memberikan makna bahwa pandangan-pandangan yang dimiliki oleh manajemen menjadi pilihan yang harus ditempuh oleh anak buah.

Dari empat model itu (Lihat Gambar 1), maka FIFA menggunakan strategi (kotak yang terdapat di “koordinat” model informasi– *managerial control*) ketika berkomunikasi dengan anggotanya yang tengah bermasalah. Dalam konteks ini adalah Bosnia dan Indonesia. Kontrol strategi adalah cara-cara yang dilakukan secara jelas oleh manajemen untuk memperluas kontrol mereka. Dalam organisasi, model kontrol strategi ditunjukkan lewat cara-cara diktator yang ditunjukkan oleh jajaran manajemen terhadap anggotanya yang sedang bermasalah.

FIFA selalu mengatakan satu hal yakni “turuti statuta FIFA jika tak mau kena sanksi”. Bahkan kekuatan dari kekuasaan organisasi yang bermarkas di Swiss itu tidak hanya pada perintah menggunakan

Statuta FIFA. Sebuah surat perintah dari FIFA bisa diperlakukan selayaknya “sabda baginda” (Berharap FIFA datang ke Indonesia”, detik.com) oleh anggotanya. Contohnya adalah surat FIFA yang melarang Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro untuk maju di Kongres PSSI untuk dipilih sebagai ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif periode 2011-2015. Nurdin yang pernah dibui karena kasus korupsi memang melanggar statuta FIFA (orang yang pernah dihukum karena tindakan kriminal tidak boleh mencalonkan diri). Namun, tiga nama lainnya tak melanggar statuta FIFA. Keempat nama itu ditolak oleh KN PSSI untuk ambil bagian dalam kongres.

FIFA juga tak pernah mengadakan dialog dengan negara anggotanya yang tengah bermasalah. Pembentukan KN PSSI contohnya, semuanya ditentukan FIFA mulai dari penunjukan personelnnya hingga penempatan mereka di jabatan-jabatan tersebut. Ketika bertugas pun, KN juga berlaku selayaknya operator FIFA (Bung Kus: KN jangan jadi operator FIFA). Mereka dikritik karena justru tidak mengakomodir keinginan-keinginan apa saja yang muncul

dari para pemegang suara di PSSI. Memang, Agum Gumelar selaku ketua KN pernah datang menemui Sepp Blatter di Swiss untuk mengungkapkan keinginan para pendukung Toisutta-Panigoro, namun perjalanan ke markas FIFA tersebut tak membuahkan hasil.

Deetz berpendapat langkah strategis ditempuh manajemen demi melakukan efisiensi. Tidak adanya komunikasi dua arah membuat manajemen tidak perlu membuang waktu untuk membicarakan suatu masalah dengan para pemangku kepentingan.

Menurut Deetz, kesuksesan atau pun kegagalan sebuah perusahaan bergantung dari bagaimana kontrol strategi manajerial. Ia menilai bahwa kontrol strategi memiliki kerugian yang cukup jelas. Biaya untuk melakukan kontrol cukup tinggi, dan anak buah merasakan tekanan secara konstan akibat pengawasan yang dilakukan oleh manajemen.

Kolonisasi FIFA

Seperti sudah dituliskan, kekuasaan FIFA begitu besar bahkan bisa meruntuhkan batas-batas kedaulatan negara. Sebagai contoh, pemerintah

Indonesia pasca KSN tahun 2010 tidak segera bertindak terhadap PSSI karena takut dengan sanksi FIFA yang bisa merugikan sepakbola nasional. Efek paling nyata dari sanksi FIFA adalah tim nasional sepakbola Indonesia tidak bisa ambil bagian di kejuaraan internasional. Padahal faktanya, keikutsertaan timnas Indonesia selama ini di kancah internasional pun juga tak pernah berbuah prestasi. Jadi, mau ikut atau absen di kejuaraan internasional pun, sebenarnya tak terlalu berefek signifikan.

Nilai-nilai dari sebuah organisasi yang menjalar ke luar sehingga mempengaruhi pola pikir pihak lain di luar organisasi dikenal dengan sebutan kolonisasi. Konsep ini diperkenalkan guna menyoroiti fenomena kolonisasi korporasi dalam kehidupan sehari-hari. Korporasi dipandang sebagai organisasi besar yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Konsep kolonisasi korporat memberikan perhatian pada cara organisasi tempat kerja menguasai kehidupan di luar perusahaan seperti cara hidup masyarakat. Dalam periode sejarah yang berbeda, institusi telah mendominasi makna, dan identitas pribadi lebih kuat

berada di dalamnya. Di zaman penjajahan korporat, perusahaan memberikan pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan dan cara hidup (Littlejohn dan Foss, 2009).

Terkait kolonisasi, pendekatan kritis memfokuskan pada bagaimana produksi dan reproduksi sebuah struktur wacana memposisikan subjek dengan cara tertentu. Proses komunikatif beberapa formasi akan menjadi dominan, dan proses untuk membungkam cara-cara berpikir atau tindakan tertentu yang bisa memicu konflik dan mencegah wacana berbeda yang mungkin dapat bertentangan atau malah berpotensi mengubah hal-hal yang sudah eksis.

Konsep kolonisasi bisa diterapkan pada kasus FIFA, meskipun profit bukan tujuan utama organisasi tertinggi sepakbola dunia ini. Adalah peraturan FIFA yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah terhadap federasi atau asosiasi sepakbola sebuah negara yang merupakan anggota FIFA akan berakibat pada jatuhnya sanksi kepada negara tersebut. Sanksi berupa pembekuan keanggotaan yang imbasnya sudah disebutkan sebelumnya. Sebenarnya

hanya sepakbola saja yang dirugikan jika sanksi jatuh. Negara tidak akan runtuh saat sanksi FIFA jatuh (Marsis, 2011: 67). Namun ancaman sanksi ini faktanya—dalam kasus Indonesia—membuat pemerintah menghadapi situasi yang sulit antara bertindak atau diam saja.

Pemerintah pun sudah bertindak dengan tidak mengakui lagi PSSI di bawah kepengurusan Nurdin. Namun Nurdin cs baru benar-benar tak berkutik ketika FIFA memutuskan membentuk Komite Normalisasi PSSI, sepekan setelah pernyataan dari pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

FIFA merupakan salah satu institusi yang memiliki *power* besar. Kekuatan FIFA bahkan bisa menembus kedaulatan sebuah negara. Ketika ada asosiasi atau federasi sepakbola di sebuah negara bermasalah, otoritas di negara tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya FIFA yang punya kewenangan untuk mengatasi masalah.

Sekali otoritas bertindak guna menyelesaikan problem, justru sanksi FIFA yang akan didapat. Dalam berkomunikasi dengan anggotanya, FIFA menerapkan

pola *top down*. Jika mengacu pada kasus yang terjadi di Indonesia, memang negara anggota FIFA bisa memberikan informasi apa pun kepada FIFA terkait masalah yang dihadapi. Namun itu tetap tak mengubah keputusan dan ketetapan FIFA.

Dalam *core* ilmu komunikasi, cara FIFA berkomunikasi dengan anggotanya dan bagaimana pengaruh FIFA terhadap hal-hal yang berada di luar dirinya bisa dikaji dengan pendekatan kritis. Menggunakan analisis tersebut, maka FIFA menggunakan pola komunikasi strategis terhadap para anggotanya. Cara pandang FIFA juga telah mengkolonisasi dunia di luar sepakbola.

DAFTAR PUSTAKA

- Dziewulska, Agata. (2002). *Theory versus Practice: Peace Processes in Bosnia*. <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/BosniaTheory.pdf>, diakses 6 Februari 2012.
- Griffin, Em. (2006). *A First Look at Communication Theory Sixth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Heath, Robert L. & Bryant, Jennings. (2000). *Human Communication Theory and Research*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Laurence Cooley & Jasmin Mujanović (2015) Changing the Rules of the Game: Comparing FIFA/UEFA and EU Attempts to Promote Reform of Power-Sharing Institutions in

- Bosnia-Herzegovina, Global Society, 29:1, 42-63. URL: <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13600826.2014.974512?needAccess=true>, diakses 29 Desember 2017.
- Lirttlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A (ed). (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A. (2005). *Theories of Human Communication, Eighth Edition*. Belmont: Thomson Wadsworth.
- Marsis, Sumohadi. (2011). *Kritik Olahraga*. Jakarta: Pustaka Spirit.
- Natakusumah, Arif.(2005). "Panorama Globalisasi", kolom "Visi" Majalah Bola Vaganza No.43/Mei.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pandjaitan, Hinca IP. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Watts, William L. (2010). *Fifa uses influence, money to wield control of soccer*. <http://www.marketwatch.com/story/fifa-uses-influence-money-to-control-world-soccer-2010-04-12>, diakses 1 Februari 2012.
- Sumber dari Kantor Berita atau Situs Lembaga Resmi**
- Normalisation Committee in Indonesia*, Monday 4 April 2011. URL: <http://www.fifa.com/associations/association=idn/news/newsid=1411950.html>, diakses 7 Februari 2012.
- Forbes name Blatter among world's most powerful people*, Monday 7 November 2011. URL: <http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/president/news/newsid=1539170/index.html>, diakses 3 Februari 2012.
- "Tim Sepakbola Inggris Raya untuk Olimpiade Menuai Kecaman", BBC Indonesia, 22 Juni 2011, 15:53 WIB. URL: http://www.bbc.co.uk/indonesia/mobile/olahraga/2011/06/110622_gbolympics.shtml, diakses 6 Februari 2012.
- "Menunggu FIFA Menolak Nurdin (Lagi)", detik.com, Kamis, 03/03/2011, 11:55 WIB. URL: <http://m.detik.com/read/2011/03/03/115510/1583795/76/menunggu-fifa-menolak-nurdin--lagi->, diakses 6 Februari 2012.
- "Pemerintah Tak Akui Lagi PSSI di Bawah NH dan NB", detiksport.com, Senin, 28/03/2011, 16:36 WIB. URL: <http://www.detiksport.com/sepakbola/read/2011/03/28/163632/1602915/76/pemerintah-tak-akui-lagi- PSSI-di-bawah-nh-dan-nb>, diakses 7 Februari 2012.
- "Berharap FIFA Datang ke Indonesia", detik.com, Jumat, 29/04/2011, 22:52 WIB. URL: <http://m.detik.com/read/2011/04/29/225200/1629041/76/berharap-fifa-datang-ke-indonesia>, diakses 6 Februari 2012.
- "Bung Kus: KN Jangan Jadi Operator FIFA", detiksport.com, Sabtu, 21/05/2011, 16:37 WIB. URL: <http://www.detiksport.com/sepakbola/read/2011/05/21/163719/1643950/7/bung-kus-kn-jangan-jadi-operator-fifa>, diakses 7 Februari 2012.

*"Tim Sepakbola Britania Raya Gagal
Terbentuk".* URL:
[http://www.cnnindonesia.com/ol
ahraga/20150331120454-142-
43196/tim-sepak-bola-britania-
raya-gagal-terbentuk/](http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150331120454-142-43196/tim-sepak-bola-britania-raya-gagal-terbentuk/), diakses 15
Januari 2012.

